

EVALUASI TARIF ANGKUTAN PERKOTAAN DI KOTA TERNATE (Studi Kasus Trayek Jambula, Trayek Taduma, Trayek Togafo, dan Trayek Foramadiahi)

SITTI HARDIANTI HI. HABIB¹, NYIMAS ARNITA APRILIA², HARDJANA³

Program Studi Transportasi Darat Sarjana Terapan, PTDI-STTD Bekasi

*sittihrdntyhabib@gmail.com

Abstract: The mismatch of urban transportation fares in Ternate City between existing fares which are higher than the fares set by the government. This study was conducted in Ternate City which aims to evaluate urban transportation fares, especially on the Jambula route, Taduma route, Togafo route, and Foramadiahi route, whether they are appropriate from the perspective of operators and service users. This study was conducted using primary data collection methods, namely passenger interview data on the Jambula route, Taduma route, Togafo route, and Foramadiahi route and secondary data obtained from related agencies and general report data from the Ternate City PKL team 2024. This analysis was carried out by calculating Vehicle Operational Costs (BOK), Ability To Pay (ATP), Willingness To Pay (WTP), and subsidy calculations on the Jambula route, Taduma route, Togafo route, and Foramadiahi route. The results of this study produce tariffs applied to the Jambula route, the Taduma route, the Togafo route, and the Foramadiahi route are tariffs based on BOK, where the BOK tariff considers the expenses incurred by the operator, without ignoring the ATP and WTP tariffs. To continue to meet the willingness of passengers to pay, a subsidy scheme is needed from the government, from the results of the analysis the most economical subsidy scheme applied is the fuel subsidy scheme on the Jambula route, the Taduma route, the Togafo route, and the Foramadiahi route.

Keywords: Evaluation of Tariffs, Vehicle Operating Costs, ATP, WTP, Subsidy Schemes

Abstrak: Ketidaksesuaian tarif angkutan perkotaan Kota Ternate antara tarif eksisting yang lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan pemerintah. Penelitian ini dilakukan di Kota Ternate yang bertujuan untuk mengevaluasi tarif angkutan perkotaan khususnya pada trayek Jambula, trayek Taduma, trayek Togafo, dan trayek Foramadiahi, apakah sudah sesuai dari sudut pandang operator maupun pengguna jasa. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pengumpulan data primer yaitu data wawancara penumpang trayek Jambula, trayek Taduma, trayek Togafo, dan trayek Foramadiahi dan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait maupun data laporan umum tim PKL Kota Ternate 2024. Analisis ini dilakukan dengan perhitungan Biaya Operasioanal Kendaraan (BOK), Ability To Pay (ATP), Willingness To Pay (WTP), dan perhitungan subsidi pada trayek Jambula, trayek Taduma, trayek Togafo, dan trayek Foramadiahi. Hasil dari penelitian ini menghasilkan tarif yang diterapkan pada trayek Jambula, trayek Taduma, trayek Togafo, dan trayek Foramadiahi merupakan tarif berdasarkan BOK yang dimana karena tarif BOK mempertimbangkan pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh operator, dengan tidak mengesampingkan tarif ATP dan WTP. Untuk tetap memenuhi kemauan penumpang dalam membayar diperlukan skema subsidi dari pemerintah, dari hasil analisis skema subsidi yang paling ekonomis diterapkan adalah skema subsidi BBM pada trayek Jambula, trayek Taduma, trayek Togafo, dan trayek Foramadiahi.

Kata kunci: Evaluasi Tarif, Biaya Operasional Kendaraan, ATP, WTP, Skema Subsidi

Pendahuluan

Kota Ternate merupakan salah satu Daerah Tingkat II yang terletak di Daerah Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek terdapat 17 trayek angkutan perkotaan, namun saat ini hanya 11 trayek yang masih beroperasi di lapangan. Dalam operasional angkutan perkotaan, tarif juga menjadi faktor untuk menarik perhatian penumpang. Namun, dalam penentuan tarif, perlu dipertimbangkan baik dari sisi operator maupun pengguna jasa. Kota Ternate telah menetapkan tarif melalui SK Walikota Ternate Nomor : 141/II.14/KT/2022.

Namun berdasarkan analisa data tahun 2024 yang dilakukan oleh Tim PKL Kota Ternate ditemukan banyaknya keluhan masyarakat terhadap ketidaksesuaian tarif di Kota Ternate yang terjadi karena tarif eksisting yang lebih tinggi sebesar Rp. 15.000 daripada tarif yang ditetapkan pemerintah pada SK Walikota Ternate Nomor : 141/II.14/KT/2022 sehingga menyebabkan keterisian penumpang atau load factor rendah, akibatnya operator mengalami kerugian, maka diperlukan adanya pengevaluasian tarif.

Pengevaluasi tarif ini difokuskan pada beberapa trayek sesuai dengan hasil perbandingan. Perbandingan antara jarak, demand yang tinggi, dan load factor pada angkutan perkotaan sangat penting dalam menentukan trayek mana saja yang perlu dikaji untuk mengevaluasi tarif angkutan perkotaan. Hasil perbandingan tersebut terdapat 4 trayek yang harus diteliti dalam penelitian ini yaitu trayek Jambula, trayek Taduma, trayek Togafo, dan trayek Foramadiahi. Hasil dari penelitian ini menfokuskan pada usulan tarif baru untuk angkutan perkotaan trayek Jambula, trayek Taduma, trayek Togafo, dan trayek Foramadiahi.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan alur metodologi penelitian yaitu identifikasi masalah, rumusan masalah, pengumpulan data sekunder dan data primer, pengolahan dan analisis data, dengan tujuan tahap akhir adanya usulan tarif baru yang ditetapkan pemerintah.

Teknik pengumpulan data yang dibutuhkan pada penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung pada saat survey di lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah ada atau diperoleh melalui instansi terkait dan hasil Laporan Umum Tim PKL Kota Ternate 2024.

A. Pengumpulan data sekunder

Data sekunder yang dibutuhkan pada penelitian diperoleh dari :

1. Kota Ternate Dalam Angka 2024
Data yang didapat berupa data-data sebagai berikut :
 - a) Daftar kecamatan dan kelurahan Kota Ternate
 - b) Daftar luas wilayah Kota Ternate
2. Dinas Perhubungan Kota Ternate
Data dari Dinas Perhubungan Kota Ternate berupa SK Tarif
3. Data Jumlah Armada dari ISSAP (Ikatan Solidaritas Sopir Angkutan Penumpang)
Dari ISSAP didapat data berupa data angkutan umum untuk mengetahui jumlah armada yang beroperasi saat ini
4. Laporan Umum Tim PKL Kota Ternate 2024
Data yang didapatkan dari Laporan Umum Tim PKL Kota Ternate 2024 berupa:
 - a) Data inventarisasi angkutan kota untuk memperoleh data tarif eksisting
 - b) Data jumlah penumpang yang terangkut (orang/hari)

B. Metode pengumpulan data primer

Dalam metode ini, data didapatkan dengan melaksanakan pengamatan langsung di lapangan area studi, pengamatan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Data terkait dasar komponen BOK untuk mengetahui harga komponen BOK di wilayah Kota Ternate.
2. Data wawancara mengenai kemampuan dan kemauan membayar dari penumpang pengguna trayek Jambula, trayek Taduma, trayek Togafo, dan trayek Foramadiahi.
3. Data penghasilan dan pengeluaran untuk angkutan perkotaan per bulan dari responden.

Hasil dan Pembahasan

Biaya Operasional Kendaraan

Perhitungan tiap komponen Biaya Operasional Kendaraan (BOK), diperlukan harga tiap-tiap komponen BOK. Harga tiap komponen BOK di Kota Ternate bersumber dari berbagai pihak, seperti dealer kendaraan untuk harga unit mobil, SPBU Pertamina untuk harga BBM, bengkel dan toko suku cadang lokal untuk harga oli, ban, dan filter, serta Dinas Perhubungan dan SAMSAT Kota Ternate untuk informasi biaya administrasi seperti STNK, dan izin trayek. Berikut merupakan rekapitulasi dari Biaya Operasional Kendaraan (BOK) pada trayek Jambula, trayek Taduma, trayek Togafo, dan trayek Foramadiahi :

Tabel 1 Rekapitulasi Biaya Oprasioanal Kendaraan trayek Jambula, trayek Taduma, trayek Togafo, dan trayek Foramadiahi

REKAPITULASI BIAYA		TRAYEK JAMBULA	TRAYEK TADUMA	TRAYEK TOGAFO	TRAYEK FORAMADIAHI
BOK/KEND-KM					
1	BIAYA INVESTASI ARMADA	Rp 173,03	Rp 115,35	Rp 127,86	Rp 193,69
2	BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN	Rp 769,25	Rp 658,14	Rp 682,22	Rp 809,05
3	BIAYA INVESTASI SISTEM MONITORING	-	-	-	-
4	BIAYA AWAK KENDARAAN PER ANGKOT	Rp 1.667	Rp 1.111,11	Rp 1.232	Rp 1.866
5	BIAYA PENINGKATAN FASILITAS	-	-	-	-
6	BIAYA ASURANSI PENUMPANG	-	-	-	-
7	BIAYA PENGELOLAAN	Rp 6,94	Rp 4,63	Rp 5,13	Rp 7,77
8	BIAYA TIDAK LANGSUNG	-	-	-	-
9	TOTAL BIAYA PER TAHUN	Rp 2.616	Rp 1.889	Rp 2.047	Rp 2.876
10	MARGIN LABA (10%)	Rp 261,59	Rp 188,92	Rp 204,67	Rp 287,62
11	PPH (2%)	-	-	-	-
TOTAL (Rp/Kend-Km)		Rp 2.877	Rp 2.078	Rp 2.251	Rp 3.164

Sumber : Hasil Analisis 2025

Berdasarkan tabel 1 Biaya Operasional Kendaraan (BOK) untuk angkutan trayek Jambula sebesar Rp 2.877/kend-km, trayek Taduma sebesar 2.078/kend-km, trayek Togafo sebesar Rp 2.251/kend-km, dan trayek Foramadiahi sebesar Rp 3.164/kend-km.

Tarif Berdasarkan Biaya Oprasioanal Kendaraan

Untuk menghitung biaya operasional per penumpang/km digunakan *load factor* sesuai dengan kondisi lapangan dengan rumus :

$$\text{Biaya pnp/km} = \frac{\text{Total Rp/km}}{\text{Lf} \times C}$$

Tabel 2 Rekapitulasi Tarif BOK Per Pnp-Km Trayek Jambula, Trayek Taduma, Trayek Togafo, dan Trayek Foramadiahi

TRAYEK	LOAD FACTOR (%)	KAPASITAS	TARIF PNP KM (Pnp/Km)	TARIF BERDASARKAN BOK (Rp/Pnp-Km)
Trayek Jambula	10%	11	Rp 2.616	Rp 26.159
	20%	11	Rp 1.308	Rp 13.079
	30%	11	Rp 871,96	Rp 8.720
	40%	11	Rp 653,97	Rp 6.540
	47%	11	Rp 622,83	Rp 6.228
	60%	11	Rp 435,98	Rp 4.360
	70%	11	Rp 373,70	Rp 3.737
	80%	11	Rp 326,99	Rp 3.270
	90%	11	Rp 290,65	Rp 2.907
	100%	11	Rp 261,59	Rp 2.616
Trayek Taduma	10%	11	Rp 1.889	Rp 42.508
	20%	11	Rp 944,62	Rp 21.254
	30%	11	Rp 629,74	Rp 14.169
	40%	11	Rp 472,31	Rp 10.627
	48%	11	Rp 393,59	Rp 8.856
	60%	11	Rp 314,87	Rp 7.085
	70%	11	Rp 269,89	Rp 6.073
	80%	11	Rp 236,15	Rp 5.313
	90%	11	Rp 209,91	Rp 4.723
	100%	11	Rp 188,92	Rp 4.251

Trayek Togafo	10%	11	Rp	2.047	Rp	41.549
	20%	11	Rp	1.023,37	Rp	20.774
	30%	11	Rp	682,25	Rp	13.850
	40%	11	Rp	511,68	Rp	10.387
	47%	11	Rp	435,48	Rp	8.840
	60%	11	Rp	341,12	Rp	6.925
	70%	11	Rp	292,39	Rp	5.936
	80%	11	Rp	255,84	Rp	5.194
	90%	11	Rp	227,42	Rp	4.617
	100%	11	Rp	204,67	Rp	4.155
Trayek Foramadiahi	10%	11	Rp	2.876	Rp	38.541
	20%	11	Rp	1.438	Rp	19.270
	30%	11	Rp	958,73	Rp	12.847
	40%	11	Rp	719,05	Rp	9.635
	45%	11	Rp	639,15	Rp	8.565
	60%	11	Rp	479,36	Rp	6.423
	70%	11	Rp	410,88	Rp	5.506
	80%	11	Rp	359,52	Rp	4.818
	90%	11	Rp	319,58	Rp	4.282
	100%	11	Rp	287,62	Rp	3.854

Sumber : Hasil Analisis 2025

Berdasarkan tabel 2 tarif berdasarkan BOK dengan load factor eksisting untuk angkutan perkotaan trayek Jambula sebesar Rp 6.228/pnp-km, trayek Taduma sebesar Rp 8.856/pnp-km, trayek Togafo sebesar Rp 8.840/pnp-km, dan trayek Foramadiahi sebesar Rp 8.856/pnp-km.

Tarif Berdasarkan Ability To Pay (ATP) dan Willingness To Pay (WTP)

A. Ability To Pay (ATP)

Dalam menghitung tarif berdasarkan Ability To Pay (ATP), diperlukan estimasi biaya perjalanan yang wajar untuk satu kali perjalanan. Metode ATP ini menggunakan pendekatan alokasi biaya transportasi dari pendapatan rutin masyarakat. Data Mengenai penghasilan bulanan dan alokasi biaya transportasi didapat pada saat survey. Nilai ATP yang didapat dari responden berupa jumlah uang yang dibayar oleh penumpang untuk tarif angkutan perkotaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi ATP antara lain penghasilan bulanan, alokasi biaya transportasi, dan intensitas perjalanan. Kemampuan membayar ini dipengaruhi oleh pendapatan penumpang. Ukuran ATP adalah rasio anggaran transportasi terhadap volume untuk perpindahan perjalanan. Berikut merupakan rekapitan rata-rata tarif ATP yang didapatkan pada trayek Jambula, trayek Taduma, trayek Togafo, dan trayek Foramadiahi :

Tabel 3 Rekapitulasi Besaran Tarif ATP Trayek Jambula, Trayek Taduma, Trayek Togafo, dan Trayek Foramadiahi

TRAYEK	BESARAN TARIF ATP
Trayek Jambula	Rp 11.216
Trayek Taduma	Rp 12.006
Trayek Togafo	Rp 11.526
Trayek Foramadiahi	Rp 11.186
Rata-Rata	Rp 11.484

Sumber : Hasil Analisis 2025

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa besaran tarif ATP pada trayek Jambula sebesar Rp. 11.216, trayek Taduma sebesar Rp. 12.006, trayek Togafo sebesar Rp. 11.526, dan trayek Foramadiahi sebesar Rp. 11.186. Dengan rata-rata ATP dari keempat trayek sebesar Rp. 11.484.

B. Willingness To Pay (WTP)

Willingness to Pay (WTP) merupakan kemauan pengguna jasa angkutan umum untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan (dalam bentuk uang) jika pelayanan yang diberikan operator memadai. Untuk menentukan besaran tarif WTP dalam satuan rupiah ditentukan dengan cara menanyakan kepada penumpang, khususnya pada trayek Jambula, trayek Taduma, trayek Togafo dan trayek Foramadiahi, mengenai kisaran tarif yang dianggap layak untuk perjalanan pada trayek yang digunakan. Nilai WTP berupa nilai maksimum rupiah yang bersedia dibayarkan responden untuk diolah dan mendapatkan nilai rata-rata WTP tersebut. Berikut merupakan rekapitan rata-rata besaran tarif WTP yang didapatkan pada trayek Jambula, trayek Taduma, trayek Togafo, dan trayek Foramadiahi :

Tabel 4 Rekapitulasi Besaran Tarif WTP Trayek Jambula, Trayek Taduma, Trayek Togafo, dan Trayek Foramadiahi

TRAYEK	BESARAN TARIF WTP
Trayek Jambula	Rp 6.198
Trayek Taduma	Rp 7.699
Trayek Togafo	Rp 7.531
Trayek Foramadiahi	Rp 7.795
Rata-Rata	Rp 7.306

Sumber : Hasil Analisis 2025

Berdasarkan tabel V.4 tersebut didapatkan tarif berdasarkan keinginan penumpang pada trayek Jambula sebesar Rp. 6.198, trayek Taduma sebesar Rp. 7.699, trayek Togafo sebesar Rp. 7.531, dan trayek Foramadiahi sebesar Rp. 7.795. Dengan rata-rata WTP dari keempat trayek sebesar Rp. 7.306.

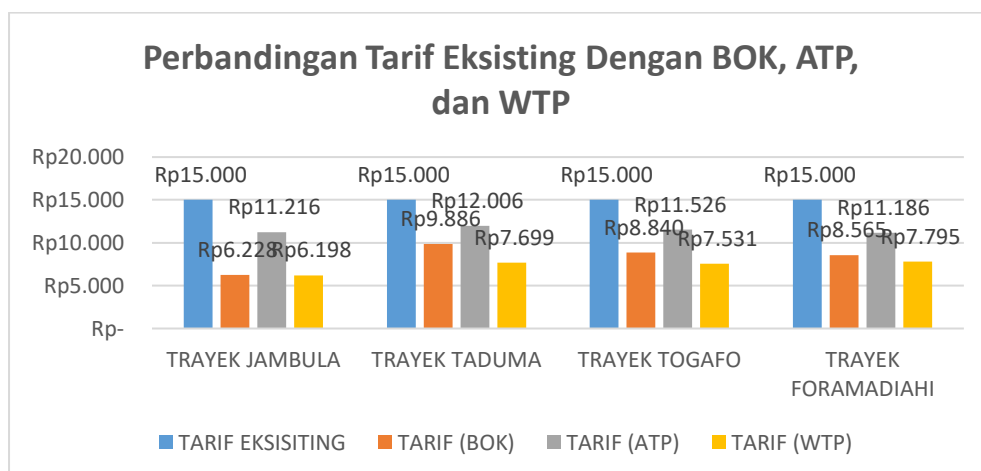
Usulan Pemberlakuan Tarif Berdasarkan BOK, ATP dan WTP

Dengan perbandingan perhitungan tarif BOK, ATP dan WTP, pemerintah dapat menetapkan kebijakan mengenai pemberlakuan tarif angkutan perkotaan pada trayek Jambula, trayek Taduma, trayek Togafo, dan trayek Foramadiahi di Kota Ternate. Sebelum mengusulkan tarif terlebih dahulu mengetahui perbandingan antara tarif eksisting dengan tarif berdasarkan BOK, ATP. Dan WTP pada angkutan perkotaan khususnya trayek Jambula, trayek Taduma, trayek Togafo, dan trayek Foramadiahi :

Tabel 5 Perbandingan Tarif Eksisting Dengan Tarif BOK, ATP, dan WTP

PERBANDINGAN TARIF EKSISTING, BOK, ATP, DAN WTP					
TRAYEK	TARIF EKSISITING	TARIF (BOK)	TARIF (ATP)	TARIF (WTP)	
TRAYEK JAMBULA	Rp 15.000	Rp 6.228	Rp 11.216	Rp 6.198	
TRAYEK TADUMA	Rp 15.000	Rp 9.886	Rp 12.006	Rp 7.699	
TRAYEK TOGAFO	Rp 15.000	Rp 8.840	Rp 11.526	Rp 7.531	
TRAYEK FORAMADIAHI	Rp 15.000	Rp 8.565	Rp 11.186	Rp 7.795	
RATA-RATA	Rp 15.000	Rp 8.380	Rp 11.484	Rp 7.306	

Sumber : Hasil Analisis 2025



Sumber : Hasil Analisis 2025

Gambar 1 Perbandingan Grafik Tarif Eksisting Dengan BOK, ATP, WTP

Berdasarkan tabel V.5, perbandingan tarif eksisting dengan tarif yang sudah dihitung berdasarkan analisis BOK, ATP, dan WTP termaksud berbeda atau lebih kecil dibandingkan dengan tarif eksisting sekarang. Dari ketiga analisis yang dihitung dan setelah perbandingan maka, tarif yang diusulkan merupakan tarif berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dikarenakan tarif berdasarkan BOK mempertimbangkan pengeluaran - pengeluaran rutin yang dikeluarkan oleh pihak operator, dengan tidak mengesampingkan tarif ATP dan WTP. Jadi usulan tarif yang baru berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK). Berikut merupakan tabel usulan tarif :

Tabel 6 Usulan Tarif

USULAN TARIF			
TRAYEK	PANJANG RUTE (KM)	TARIF (BOK)	USULAN TARIF BARU
TRAYEK JAMBULA	10	Rp 6.228	Rp 7.000
TRAYEK TADUMA	22,5	Rp 9.886	Rp 10.000
TRAYEK TOGAFO	20,3	Rp 8.840	Rp 9.000
TRAYEK FORAMADIAHI	13,4	Rp 8.565	Rp 9.000
RATA-RATA		Rp 8.380	Rp 8.750

Sumber : Hasil Analisis 2025

Berdasarkan tabel V.6 usulan tarif berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) pada trayek Jambula sebesar Rp. 6.228 diusulkan menjadi Rp. 7.000, tarif pada trayek Taduma sebesar Rp. 9.886 diusulkan menjadi Rp. 10.000, tarif pada trayek Togafo sebesar Rp. 8.840 diusulkan menjadi Rp. 9.000, dan tarif pada trayek Foramadiahi sebesar Rp. 8.565 diusulkan menjadi Rp. 9.000. Dengan rata-rata dari keempat trayek sebesar Rp. 8.750. Tarif dibulatkan keatas karena bertujuan untuk mempermudah proses transaksi tunai antara penumpang dan pengemudi. Selain itu, pembulatan ke atas juga disesuaikan dengan nominal pecahan uang yang umum digunakan masyarakat, sehingga memudahkan penumpang dalam menyiapkan uang pas dan mempercepat proses pembayaran.

Analisis Besaran Subsidi

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 185 ayat 1 disebutkan bahwa angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Subsidi angkutan perkotaan adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada penyelenggara layanan transportasi umum di Kota Ternate, dengan tujuan untuk menjaga tarif tetap terjangkau, meningkatkan pelayanan, dan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

Pemberian subsidi perlu dianalisis dan dipertimbangkan secara cermat agar tidak membani anggaran pemerintah daerah secara berlebihan, demi menjamin keberlangsungan operasional angkutan perkotaan di Kota Ternate. Berdasarkan usulan tarif pada tabel V.25 maka dihitung mekanisme pemberian subsidi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Ternate, yaitu mekanisme subsidi BOK, mekanisme subsidi Tarif, dan mekanisme subsidi BBM.

A. Mekanisme Subsidi dari Angkutan BOK

Mekanisme pemberian subsidi angkutan dari BOK ini memberikan tanggung jawab penuh terhadap pemerintah dalam pembiayaan angkutan perkotaan. Pembiayaan ini mesyaratkan kecukupan anggaran Pemerintah Daerah Kota Ternate dalam pelaksanaannya. Kelebihan dari skema ini adalah tarif angkutan perkotaan bahkan dapat digratiskan guna mendorong masyarakat untuk beralih ke angkutan umum. Kekurangannya adalah kebutuhan dana yang cukup besar dan tidak mendidik masyarakat untuk mandiri. Berikut ini merupakan tabel analisis mekanisme subsidi BOK pada angkutan perkotaan trayek Jambula, trayek Taduma, trayek Togafo, dan trayek Foramadiahi :

Tabel 7 Mekanisme Subsidi dari Angkutan BOK

Mekanisme Subsidi Penuh (BOK)					
Komponen	Angkutan Perkotaan				Satuan
	Trayek Jambula	Trayek Taduma	Trayek Togafo	Trayek Foramadiahi	
I. Kilometer Tempuh :					
1. Per Rit	20	45	40,6	26,8	km
2. Per Hari	120	180	162,4	107,2	km
3. Per Bulan	3.600	5.400	4.872	3.216	km
4. Per Tahun	43.200	64.800	58.464	38.592	km
Jumlah Rit Per Hari	6	4	4	4	rit
Jumlah Kend Beroperasi	40	5	5	5	kendaraan
Kapasitas Angkut	11	11	11	11	penumpang
II. BOK dengan Margin Keuntungan 10%					
Subsidi Penuh (BOK)	Rp 2.877	Rp 2.078	Rp 2.251	Rp 3.164	Rp/Kend-Km
III. Kebutuhan Anggaran per Tahun Untuk 1 Kend					
Subsidi Penuh	Rp 124.307.260	Rp 134.664.640	Rp 131.626.475	Rp 122.097.686	Rp/tahun
IV. Subsidi Pemerintah per Tahun					
Subsidi Penuh	Rp 4.972.290.400	Rp 673.323.200	Rp 658.132.376	Rp 610.488.428	Rp/tahun
Jumlah Subsidi Penuh/tahun	Rp 6.914.234.404				Rp/tahun

Sumber : Hasil Analisis 2025

Berdasarkan Tabel V.7 subsidi angkutan dari BOK untuk trayek Jambula per tahun sebesar Rp. 4.972.290.400, untuk trayek Taduma per tahun sebesar Rp. 673.323.200, untuk trayek Togafo per tahun sebesar Rp. 658.132.376, dan untuk trayek Foradiahi per tahun sebesar Rp. 610.488.428, dengan total subsidi dari keempat trayek per tahunnya sebesar Rp. 6.914.234.404.

Pemberian subsidi BOK angkutan perkotaan trayek Jambula, trayek Taduma, trayek Togafo, dan trayek Foradiahi ini diberikan dalam satu tahun untuk semua kendaraan pada tiap trayek maka sulit diberikan oleh pemerintah karena besarnya nominal anggaran yang dibutuhkan. Anggaran subsidi yang besar akan menjadi beban berat bagi keuangan daerah karena pemerintah juga memiliki keterbatasan fiskal dan banyak kebutuhan lain yang harus didanai.

B. Mekanisme Subsidi Selisih Biaya Operasional

Pada mekanisme subsidi selisih operasional ini, pemerintah memberikan subsidi sejumlah kekurangan biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan masuk. Jadi, pengguna angkutan perkotaan tetap dikenakan tarif, yang dirancang tetap terjangkau oleh pengguna angkutan perkotaan. Selain membantu meringankan beban anggaran pemerintah apabila dibandingkan dengan subsidi penuh, juga akan mendidik masyarakat untuk tidak terbiasa dengan segala macam fasilitas yang sifatnya gratis.

Mekanisme subsidi selisih operasional dipengaruhi oleh faktor muat (*load factor*) eksisting dan pendapatan angkutan perkotaan per tahun dari trayek Jambula, trayek Taduma, trayek Togafo, dan trayek Foradiahi, maka didapatkan perhitungan seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 8 Mekanisme Subsidi Selisih Biaya Oprasional

Subsidi Selisih Biaya Oprasional					
Komponen	Angkutan Perkotaan				Satuan
	Trayek Jambula	Trayek Taduma	Trayek Togafo	Trayek Foramadiahi	
I. Kilometer Tempuh :					
1. Per Rit	20	45	40,6	26,8	km
2. Per Hari	120	180	162,4	107,2	km
3. Per Bulan	3.600	5.400	4.872	3.216	km
4. Per Tahun	43.200	64.800	58.464	38.592	km
Jumlah Rit Per Hari	6	4	4	4	rit
Jumlah Kend Beroprasi	40	5	5	5	kendaraan
Kapasitas Angkut	11	11	11	11	penumpang
II. Tarif dan Asumsi					
Tarif	Rp 6.228	Rp 9.886	Rp 8.840	Rp 8.565	Rp/pnp-km
Jumlah Pnp/Tahun (Lf Eksisting)	446.688	38.016	37.224	35.640	Pnp/tahun
III. BOK dengan Margin Keuntungan 10%					
Total	Rp 2.877	Rp 2.078	Rp 2.251	Rp 3.164	Rp/Kend-Km
IV. Biaya Ditanggung per Tahun : (BOK per Km x Km/Tahun)					
Total	Rp 4.972.290.400	Rp 673.323.200	Rp 658.132.376	Rp 610.488.428	Rp/tahun
V. Pendapatan per Tahun : (Jumlah Pnp/Tahun x Tarif)					
Total	Rp 2.782.114.867	Rp 375.808.298	Rp 329.066.188	Rp 305.244.214	Rp/tahun
VI. Subsidi Pemerintah per Tahun (IV-V)					
Subsidi Selisih Oprasional	Rp 2.190.175.533	Rp 297.514.902	Rp 329.066.188	Rp 305.244.214	Rp/tahun
Jumlah Subsidi Selisi Ops/tahun	Rp 3.122.000.838				Rp/tahun

Sumber : Hasil Analisis 2025

Berdasarkan tabel V.8 subsidi selisih antara biaya BOK per kend-km dalam satu tahun dan pendapatan operator dalam satu tahun maka, subsidi selisih yang perlu diberikan pemerintah pada angkutan perkotaan trayek Jambula sebesar Rp. 2.190.175.533, untuk trayek Taduma sebesar Rp. 297.514.902, untuk trayek Togafo sebesar Rp. 329.066.188, dan untuk trayek Foramadiahi sebesar Rp. 305.244.214. Dengan demikian, pemerintah harus menyediakan anggaran yang akan diberikan untuk semua kendaraan pada trayek Jambula, trayek Taduma, trayek Togafo, dan trayek Foramadiahi sebesar Rp. 3.122.000.838. Dari perhitungan subsidi selisih biaya oprasional, subsidi yang diberikan adalah subsidi selisih antara total biaya oprasional dengan pendapatan yang diterima oleh operator.

C. Mekanisme Subsidi BBM

BBM digunakan untuk operasional angkutan perkotaan, maka mekanisme ini BBM ditanggung oleh Pemerintah. Artinya, operator tetap mendapat beban untuk menjaga harga sesuai dengan ketentuan asumsi semula dengan catatan komponen lainnya tetap sama.

Skema pembiayaan dengan mekanisme subsidi BBM ini merupakan cara yang aman untuk menghindari gejolak tarif akibat fluktuasi harga BBM, karena komponen ini dikeluarkan dari perhitungan BOK. Namun, pelaksanaan mekanisme ini sangat rumit dan sangat dihindari, karena kewenangan distribusi BBM bukan pada pihak pemerintah daerah. Perhitungan BOK subsidi BBM secara rinci pada trayek Jambula, trayek Taduma, trayek Togafo, dan trayek Foramadiahi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 9 Mekanisme Subsidi BBM

Mekanisme Subsidi BBM					
Komponen	Angkutan Perkotaan				Satuan
	Trayek Jambula	Trayek Taduma	Trayek Togafo	Trayek Foramadiahi	
I. Kilometer Tempuh :					
1. Per Rit	20	45	40,6	26,8	km
2. Per Hari	120	180	162,4	107,2	km
3. Per Bulan	3.600	5.400	4.872	3.216	km
4. Per Tahun	43.200	64.800	58.464	38.592	km
Jumlah Rit Per Hari	6	4	4	4	rit
Jumlah Kend Beroperasi	40	5	5	5	kendaraan
Kapasitas Angkut	11	11	11	11	penumpang
II. Penggunaan BBM					
Pemakaian BBM/kend/Km	0,111	0,111	0,111	0,111	Liter/Km
Pemakaian BBM/kend/hari	13,33	20,00	18,04	11,91	Liter/hari
Rasio Penggunaan BBM	9	9	9	9	Km/liter
Harga BBM	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp/liter
Pemakaian BBM/kend/Tahun	4.800	7.200	6.496	4.288	Liter/tahun
III. Biaya BBM/Kend/Tahun					
Total	Rp 48.000.000	Rp 72.000.000	Rp 64.960.000	Rp 42.880.000	Rp/tahun
IV. Subsidi Pemerintah Per Tahun					
Subsidi BBM	Rp 1.920.000.000	Rp 360.000.000	Rp 324.800.000	Rp 214.400.000	Rp/tahun
Jumlah Subsidi BBM/tahun	Rp 2.819.200.000				Rp/tahun

Sumber : Hasil Analisis 2025

Berdasarkan tabel V.9 pemakaian BBM per kend per tahun pada trayek Jambula sebanyak 4.800 liter/tahun, trayek Taduma sebanyak 7.200 liter/tahun, trayek Togafo sebanyak 6.496 liter/tahun, dan pada trayek Foramadiahi sebanyak 4.288 liter/tahun. Perhitungan subsidi BBM didapat dari perhitungan harga BBM per liter dikali pemakaian BBM per kend per tahun dikali jumlah kend yang beroperasi maka, pemerintah harus menyediakan anggaran untuk setiap trayek per tahunnya yang pada trayek Jambula sebesar Rp. 1.920.000.000, pada trayek Taduma sebesar Rp. 360.000.000, pada trayek Togafo sebesar Rp. 324.800.000, dan pada trayek Foramadiahi sebesar Rp. 214.400.000. Dengan demikian, pemerintah harus menyediakan anggaran yang akan diberikan pada trayek Jambula, trayek Taduma, trayek Togafo, dan trayek Foramadiahi dengan total sebesar Rp. 2.819.200.000 per tahunnya. Dari perhitungan subsidi BBM, subsidi yang diberikan adalah subsidi biaya BBM penuh dalam satuan liter yang dimana biaya BBM untuk angkutan perkotaan Kota Ternate ditanggung penuh oleh pemerintah Kota Ternate.

D. Rekapitulasi Subsidi

Berdasarkan perhitungan subsidi yang sudah dilakukan dengan tiga skema subsidi yaitu mekanisme subsidi angkutan dari BOK, mekanisme subsidi selisih biaya oprasional, dan mekanisme subsidi BBM. Subsidi yang diberikan dalam mekanisme subsidi angkutan dari BOK adalah subsidi penuh untuk Biaya Oprasional Kendaraan (BOK), yang dimana dalam subsidi penuh ini pemerintah full menanggung biaya komponen-komponen BOK. Untuk, subsidi yang diberikan dalam mekanisme subsidi selisih biaya oprasional adalah subsidi selisih antara total biaya oprasional dengan pendapatan yang diterima oleh operator. Sedangkan, subsidi yang diberikan dalam mekanisme subsidi BBM adalah subsidi biaya BBM dalam satuan liter.

Berikut merupakan rekapitulasi besaran subsidi BBM yang disubsidikan kepada angkutan perkotaan trayek Jambula, trayek Taduma, trayek togafo, dan trayek Foramadiahi :

Tabel 10 Rekapitulasi Besaran Subsidi yang Disubsidikan Per Tahun

BESARAN SUBSIDI YANG DISUBSIDIKAN PERTAHUN			
ANGKUTAN PERKOTAAN			
TRAYEK	Subsidi Angkutan dari BOK	Subsidi Selisih Biaya Oprasional	Subsidi BBM
Trayek Jambula	Rp 4.972.290.400	Rp 2.190.175.533	Rp 1.920.000.000
Trayek Taduma	Rp 673.323.200	Rp 297.514.902	Rp 360.000.000
Trayek Togafo	Rp 658.132.376	Rp 329.066.188	Rp 324.800.000
Trayek Foramadiah	Rp 610.488.428	Rp 305.244.214	Rp 214.400.000
RATA-RATA	Rp 1.728.558.601	Rp 780.500.209	Rp 704.800.000

Sumber : Hasil Analisis 2025

Dari hasil rekapitulasi pada tabel V.10, rata-rata besaran subsidi yang disubsidikan per tahun, yang tertinggi terlihat pada subsidi angkutan dari BOK per tahun dengan rata-rata pada trayek Jambula, trayek Taduma, trayek Togafo, dan trayek Foramadiah sebesar Rp. 1.728.558.601 dan yang terendah terdapat pada subsidi BBM per tahun dengan rata-rata pada trayek Jambula, trayek Taduma, trayek Togafo, dan trayek Foramadiah sebesar Rp. 704.800.000.

Dari hasil rekapitulasi subsidi, diketahui bahwa subsidi BBM merupakan subsidi dengan nilai paling kecil dibandingkan subsidi BOK dan subsidi selisih biaya operasional. Hal ini disebabkan karena bentuk subsidi BBM hanya diberikan atau ditanggung biaya dari BBM saja dan harga subsidi yang diberikan oleh pemerintah per liter. Dengan kata lain, yang disubsidikan hanya sebagian kecil dari komponen biaya operasional kendaraan, yaitu biaya bahan bakar saja, tanpa mencakup komponen penting lainnya seperti biaya pemeliharaan, depresiasi kendaraan, biaya awak kendaraan, dan lain-lain. Oleh karena itu, meskipun subsidi BBM tetap memberikan kontribusi dalam menurunkan sebagian beban biaya operasional, dampaknya terhadap penurunan total biaya secara keseluruhan relatif terbatas. Dibandingkan dengan subsidi BOK atau subsidi selisih biaya operasional, subsidi BBM memiliki nilai bantuan yang jauh lebih kecil.

Kesimpulan

1. Besaran Biaya Operasional Kendaraan (BOK) pada trayek Jambula sebesar Rp. 2.877 per kend-km, pada trayek Taduma sebesar Rp. 2.078 per kend-km, pada trayek Togafo sebesar Rp. 2.251 per kend-km, dan pada trayek Foramadiah sebesar Rp. 3.164 per kend-km.
2. Besaran tarif berdasarkan BOK pada trayek Jambula sebesar Rp. 6.228 per pnp-km, pada trayek Taduma sebesar Rp. 8.856 per pnp-km, pada trayek Togafo sebesar Rp. 8.840 per pnp-km, dan pada trayek Foramadiah sebesar Rp. 8.565 per pnp-km. Adapun perhitungan tarif BOK berdasarkan *load factor* menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keterisian penumpang (*load factor*), maka tarif per penumpang cenderung menurun.
3. Dari analisis ATP didapatkan kemampuan membayar pada trayek Jambula sebesar Rp. 11.216, pada trayek Taduma sebesar Rp. 12.006, pada trayek Togafo sebesar Rp. 11.526, dan pada trayek Foramadiah sebesar Rp. 11.186. Sedangkan untuk kemauan membayar pada trayek Jambula sebesar Rp. 6.198, pada trayek Taduma sebesar Rp. 7.699, pada trayek Togafo sebesar Rp. 7.531, dan pada trayek Foramadiah sebesar Rp. 7.795.
4. Dari analisis tarif berdasarkan BOK, ATP, dan WTP pada trayek Jambula, trayek Taduma, trayek Togafo, dan trayek Foramadiah, tarif yang paling rendah merupakan tarif berdasarkan WTP, namun tarif ini tidak dapat digunakan karena masih kurang dari Biaya Operasional Kendaraan, sehingga dari ketiga segi tarif yang dapat digunakan merupakan tarif berdasarkan BOK karena dapat mendorong efisiensi dan pelayanan yang lebih baik. Usulan tarif berdasarkan BOK diusulkan pada trayek Jambula sebesar Rp. 7.000, pada trayek trayek Taduma sebesar Rp. 9.000, pada trayek Togafo sebesar Rp. 9.000, dan trayek Foramadiah sebesar Rp. 9.000.
5. Dari tiga skema analisis subsidi yaitu subsidi angkutan dari BOK, subsidi selisih biaya operasional, dan subsidi BBM, biaya yang paling ekonomis yang dapat diberikan pemerintah untuk mengalokasikan dana kepada angkutan perkotaan trayek Jambula, trayek Taduma, trayek Togafo, dan trayek Foramadiah yakni biaya dengan skema subsidi BBM yang diberikan per tahunnya pada trayek Jambula sebesar Rp. 1.920.000.000, pada trayek Taduma sebesar Rp. 360.000.000, pada trayek Togafo sebesar Rp. 324.800.000, dan pada trayek Foramadiah sebesar Rp. 214.400.000.

Daftar Pustaka

- Pemerintah Daerah Kota Ternate. Keputusan Walikota Ternate Nomor : 141/II.14/KT/2022 Tentang Tarif Angkutan Jalan Untuk Penumpang Umum dan Mahasiswa/Pelajar Dalam Daerah Kota Ternate.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Kementrian Perhubungan. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019. Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. PM 15 Tahun 2019, 13.
- Direktur Jendral Perhubungan Darat. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.687/AJ.206/DRJD/2002 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Diwilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap Dan Teratur. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Direktur Jendral Perhubungan Darat. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.792/AJ.205/DRJD/2021 Tentang Pedoman Teknis Perhitungan Biaya
- Marjanto. (2016). Analisis Subsidi Angkutan Pedesaan Melalui Biaya Operasional Kendaraan (BOK) di Kabupaten Sleman. Jurnal Teknik Sipil , Hlm 291-300.
- Tamin, O. Z. dkk. (1999). ' Ability To Pay ' (Atp) Dan ' Willingnes To Pay ' (Wtp). Jurnal Transportasi, Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi (FSTPT), 1(2), 121–139.